

Peningkatan Elektabilitas Partai Golden Dawn dalam Pemilu Perlemen Yunani Tahun 2012 melalui Agenda Politik Anti-Imigrasi

I Gst. Ngr. Gede Agung Pradipta¹⁾, D. A. Wiwik Dharmiasih²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: pradipta.adhe@gmail.com¹⁾, wiwik@fisip.unud.ac.id²⁾, kawitriresen@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Proses Integrasi Uni Eropa sejak tahun 1990-an menuai reaksi negatif dari masyarakat negara anggotanya. Reaksi negatif yang lebih dikenal sebagai Euroscepticism ini diekspresikan dengan memberikan dukungan pada partai radikal kanan yang mengadopsi paham nasionalisme dan perspektif anti-Uni Eropa. Penelitian ini menganalisis fenomena tersebut melalui contoh kasus peningkatan elektabilitas Partai Golden Dawn dalam pemilu Parlemen Yunani tahun 2012. Peran Uni Eropa yang tinggi dalam isu imigrasi menyebabkan Pemerintah Yunani yang didominasi oleh partai politik mainstream harus menyesuaikan kebijakan imigrasi Yunani dengan kebijakan Uni Eropa. Padahal, kebijakan imigrasi tersebut bertentangan dengan kepentingan masyarakat Yunani yang menginginkan pengurangan jumlah imigran di Yunani. Sehingga, masyarakat Yunani memilih mendukung partai radikal kanan Golden Dawn yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat Yunani melalui agenda anti-imigrasi yang ditawarkan.

Kata kunci: Euroscepticism, Partai Radikal Kanan, Anti-Imigrasi

1. PENDAHULUAN

Proses integrasi Kawasan Uni Eropa kini tengah diuji. Pandangan skeptis terhadap integrasi Uni Eropa (*Euroscepticism*) semakin meluas dan populer di kalangan masyarakat negara anggota Uni Eropa. Data survey Eurobarometer dari tahun 1990 hingga 2011 menunjukkan adanya peningkatan persepsi publik yang mengatakan bahwa unifikasi negara terhadap Uni Eropa adalah hal yang buruk (European Commission, n.d. a). Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pandangan skeptis terhadap Uni Eropa diantaranya adalah ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, ketidakpercayaan terhadap institusi supranasional, kekhawatiran terhadap hilangnya identitas nasional, dan refleksi terhadap kepentingan pribadi (McLaren, 2007). *Euroscepticism* didorong oleh kebijakan Uni Eropa yang dianggap merugikan (McLaren, 2007). Kebijakan

Schengen yang memberikan peluang untuk bergerak secara bebas dalam Area Schengen dan kemajuan pesat ekonomi Uni Eropa telah menarik minat imigran dari negara non-Uni Eropa untuk bermigrasi menuju Uni Eropa (Kasimis, 2012). Akibatnya, angka imigran di Uni Eropa meningkat pesat sejak 1990-an (Triandafyllidou & Gropas, 2007b).

Awalnya imigrasi dianggap bermanfaat bagi ketersediaan tenaga kerja (*labor supply*) di negara penerima migran di Uni Eropa. Namun, seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara penerima migran, imigrasi dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi (McLaren, 2003). Krisis ekonomi Eropa di tahun 2010 mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di berbagai negara Uni-Eropa, terutama di Spanyol dan Yunani yang tingkat penganggurannya mencapai lebih dari 20% (Eurostat, 2014). Selain itu, jumlah imigran

yang besar juga dapat menjadi ancaman terhadap nilai-nilai budaya yang menjadi identitas nasional masyarakat lokal negara anggota Uni Eropa (Jozwiak, 2012). Ancaman ekonomi dan budaya ini kemudian memicu ketegangan antara masyarakat lokal dengan penduduk imigran yang cenderung berujung pada tindak kekerasan terhadap imigran. Tindak kekerasan yang muncul seperti pelecehan, pemukulan, penikaman, bahkan pembunuhan. Penyerangan terhadap imigran di Yunani mencapai 900 kasus sejak tahun 2010 (Kotsoni, 2013). Berbagai tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengintimidasi para imigran untuk kembali ke negara asalnya.

Alih-alih mendeportasi para imigran, pemerintah negara-negara penerima migran di Uni Eropa justru memberlakukan kebijakan regularisasi dan reunifikasi yang memberikan kesempatan bagi imigran untuk tetap berada di negara tersebut. Bahkan, kebijakan untuk membatasi jumlah imigran yang masuk dinilai tidak efektif, sebab masuknya imigran tercatat tetap tinggi di berbagai negara Uni-Eropa (McLaren, 2003). Keinginan masyarakat lokal untuk memulangkan penduduk imigran dari negara mereka tidak dapat terakomodasi dengan baik oleh partai politik *mainstream* yang mendominasi pemerintahan. Akibatnya, masyarakat lokal memilih untuk memberi dukungan pada partai politik radikal kanan yang menawarkan agenda politik anti-imigrasi. Sejak tahun 1980-an, dukungan terhadap partai radikal kanan di Eropa mengalami peningkatan (Mudde, 2014). Terdapat 14 dari 27 negara anggota Uni Eropa yang memiliki anggota dewan parlemen dari partai radikal kanan (Red Pepper, 2009). Salah satu partai radikal kanan yang sukses meraih dukungan suara adalah Partai Golden Dawn di Yunani pada tahun 2012.

Peningkatan dukungan terhadap partai radikal kanan di Yunani ditunjukkan dengan meningkatnya elektabilitas partai radikal kanan Golden Dawn dalam pemilu parlemen Yunani tahun 2012. Hasil pemilihan umum Parlemen Yunani menunjukkan hasil yang menarik. Dua partai *mainstream* Yunani yaitu Partai New Democracy (ND) dan Partai Pan Hellenic Socialist Movement (PASOK) mengalami penurunan perolehan suara yang cukup tinggi dibandingkan hasil pemilu sebelumnya. Sementara, partai radikal kanan Golden Dawn berhasil memperoleh peningkatan perolehan suara secara drastis sehingga berhasil menduduki 18 kursi di parlemen Yunani

(Igraphics, 2012). Padahal, Partai Golden Dawn tidak pernah memperoleh dukungan suara lebih dari 1% pada pemilu sebelumnya (Hellenic Republic Ministry of Interior, 2014). Perolehan ini merupakan keberhasilan terbesar sejak partai tersebut berdiri pada tahun 1985.

Peningkatan elektabilitas Partai Golden Dawn pada pemilu Parlemen Yunani tahun 2012 menjadi menarik sebab Golden Dawn tidak pernah meraih perolehan suara yang tinggi sebelumnya. Selain itu, ideologi yang diadopsi oleh Partai Golden Dawn mirip dengan ideologi partai radikal kanan lainnya di Eropa. Ideologi tersebut ialah fasisme atau nasionalisme. Ideologi ini sebenarnya tidak populer di Yunani pasca berakhirnya pemerintahan junta militer tahun 1974.

Peningkatan perolehan suara Partai Golden Dawn yang tinggi dipengaruhi oleh berbagai agenda politik yang ditawarkan oleh partai tersebut. Salah satu agenda politik yang ditawarkan adalah kebijakan anti-imigrasi yang bertujuan untuk mengurangi imigran di Yunani. Agenda politik anti-imigrasi tersebut berbeda dengan kebijakan imigrasi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Yunani. Kebijakan imigrasi Pemerintah Yunani sejak tahun 1997 menunjukkan bahwa pemerintah masih mentolerir keberadaan penduduk migran ilegal di Yunani (Kiprianos, et al., 2003). Penelitian ini menganalisis pengaruh agenda politik anti-imigrasi partai radikal kanan di Kawasan Uni Eropa dengan melihat contoh kasus kemenangan partai radikal kanan Golden Dawn pada pemilu Parlemen Yunani tahun 2012.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan beberapa literatur sebagai kajian yang menurut Peneliti relevan dengan fokus penelitian ini. Literatur pertama yang digunakan oleh Peneliti adalah tulisan karya Antonis A. Ellinas (2013) yang berjudul *The Rise of Golden Dawn: The New Face of the Far Right in Greece*. Tulisan ini membahas secara umum beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan elektabilitas Partai Golden Dawn pada pemilu 2012. Faktor-faktor tersebut antara lain; sistem politik Yunani yang korup dan sarat dengan praktik patronase, dampak dari krisis ekonomi Yunani, peningkatan perhatian publik pada isu imigrasi dan persepsi publik tentang kegagalan kinerja pemerintah dalam menangani isu

imigran ilegal, posisi Partai Golden Dawn di tengah masyarakat Yunani sebagai partai yang mengusung nasionalisme ekstrim, konsistensi Partai Golden Dawn sebagai partai anti-imigrasi yang terwujud dalam agenda politik partai dan aksi kekerasan terhadap penduduk migran, dan pemberitaan mengenai Partai Golden Dawn oleh media.

Ellinas (2013) menggunakan teori *Critical Elections* oleh Valdimer Orlando Key, Jr. dalam menganalisis peningkatan elektabilitas Partai Golden Dawn pada pemilu Parlemen Yunani tahun 2012. Teori *Critical Elections* menjelaskan salah satu tipe pemilu yang memiliki ciri adanya perubahan besar yang terjadi pada pola dukungan publik terhadap partai politik *mainstream*. Teori ini juga menjelaskan bahwa perubahan pola dukungan masyarakat tersebut dapat bertahan dengan stabil hingga beberapa pemilu yang akan datang. *Critical Elections* terjadi bila intensitas dukungan publik dalam pemilu sangat tinggi, terdapat perubahan yang besar pada pola hubungan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat, dan munculnya kelompok pendukung baru (*electorate grouping*) dalam kehidupan politik masyarakat. Pemilu Parlemen Yunani tahun 2012 merupakan *Critical Election* di Yunani (Ellinas, 2013). Pemilu tersebut telah memunculkan kelompok pendukung (*electoral grouping*) baru yang suportif terhadap kebijakan anti-imigrasi yang ditawarkan oleh Partai Golden Dawn. Hal ini menurut Ellinas (2013) dipengaruhi oleh keadaan ekonomi Yunani sejak tahun 2008 yang terus memburuk. Pendekatan ekonomi menjadi fokus utama dalam tulisan Ellinas (2013) untuk menjelaskan perubahan pola dukungan masyarakat Yunani pada pemilu Parlemen Yunani tahun 2012.

Penjelasan Ellinas (2013) mengenai berbagai faktor yang mendukung peningkatan elektabilitas Partai Golden Dawn memberikan gambaran kepada Peneliti mengenai penyebab perubahan pola dukungan publik terhadap partai politik *mainstream* di Yunani pada tahun 2012. Penelitian ini juga menganalisis peningkatan elektabilitas Partai Golden Dawn pada pemilu Parlemen Yunani tahun 2012. Namun, penelitian ini menganalisis pengaruh agenda politik anti-imigrasi sebagai faktor yang mendukung peningkatan elektabilitas Partai Golden Dawn. Ini berbeda dengan tulisan Ellinas (2013) yang menggunakan teori *Critical Election* dan berfokus pada aspek ekonomi dalam menjelaskan fenomena tersebut.

Tulisan kedua yang digunakan oleh Peneliti sebagai referensi adalah tulisan karya Andrew Geddes (2005) yang berjudul *Europe's Border Relationships and International Migration Relations*. Geddes (2005) menjelaskan bahwa keterkaitan antara pola hubungan perbatasan (*border relations*) negara anggota Uni Eropa dan migrasi internasional merupakan faktor penentu dimensi eksternal dari kebijakan suaka dan migrasi Uni Eropa yang menjadi semakin penting pasca Perang Dunia II. Pola perbatasan yang dimaksud Geddes (2005) tersebut terbagi atas tiga tipe; perbatasan teritori (*territorial*), organisasi (*organizational*), dan konseptual (*conceptual*).

Perkembangan isu imigrasi yang semakin kompleks di Eropa pasca Perang Dunia II dalam tulisan Geddes (2005) menunjukkan bahwa isu imigrasi menjadi isu yang sentral bagi Uni Eropa. Ini terlihat dari arah kebijakan imigrasi Uni Eropa yang mencoba menekan jumlah imigran yang masuk ke Uni Eropa dengan berbagai kebijakan, baik berupa kebijakan kontrol arus masuk imigran, maupun kebijakan preventif yang dilakukan pada negara asal para imigran. Kebijakan preventif yang merupakan dimensi eksternal dari kebijakan migrasi Uni Eropa ini menunjukkan bahwa peran Uni Eropa dalam isu imigrasi mengalami peningkatan sebab dalam kebijakan tersebut Uni Eropa mengintegrasikan isu imigrasi ke dalam isu keamanan dan isu sentral lainnya yang menjadi perhatian utama seluruh negara anggota Uni Eropa. Ini berarti, isu imigrasi tidak lagi menjadi isu yang hanya dikelola oleh pemerintah negara anggota Uni Eropa saja. Isu imigrasi menjadi sebuah isu sentral yang menjadi pilar berbagai aspek kebijakan Uni Eropa yang meliputi kebijakan luar negeri dan keamanan (*foreign and security policy*), keadilan dan urusan dalam negeri (*justice and home affairs*), dan perdagangan dan pembangunan (*trade and development*).

Sejak tahun 2004 usaha untuk mengintegrasikan berbagai aturan (*acquis*) mengenai suaka dan migrasi Uni Eropa kepada negara anggota Uni Eropa telah dilakukan secara intensif. Geddes (2005) juga mengungkapkan bahwa terjadi perubahan yang besar pada definisi batas teritori negara anggota Uni Eropa. Ini berdampak pada perubahan proses pembuatan kebijakan imigrasi di tingkat nasional. Perjanjian Schengen menyebabkan batas teritori negara anggota Uni Eropa tidak lagi menjadi tanggung

jawab negara tersebut secara penuh, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini terlihat pada Program The Hague yang mengkonsolidasi berbagai aturan mengenai migrasi dan suaka seperti sistem suaka Eropa bersama (*Common European Asylum System*), aturan bersama mengenai imigrasi legal (*common measures on legal immigration*), sistem informasi Schengen (*the Schengen information system*), dan aturan visa bersama (*common visa rules*).

Tulisan Andrew Geddes (2005) berkontribusi dalam menjelaskan hubungan antara regionalisme Uni Eropa dengan kebijakan imigrasi yang berlaku di negara anggota Uni Eropa. Geddes (2005) menjelaskan bahwa isu imigrasi yang semakin meluas pasca Perang Dunia II menyebabkan peran Uni Eropa menjadi semakin aktif dalam mengatur arus imigrasi. Uni Eropa kemudian melakukan berbagai langkah konsolidasi batas teritori melalui berbagai inisiatif dan program untuk mengatur imigrasi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan integrasi Uni Eropa memiliki pengaruh yang besar terhadap pembuatan kebijakan imigrasi di tingkat nasional.

Tulisan ketiga yang digunakan Peneliti adalah tulisan karya Scott H. Corroon (1989) yang berjudul *The Re-emergence of Europe's Far-Right*. Corroon (1989) menjelaskan dalam tulisannya bahwa sejak tahun 1980-an, partai sayap kanan ekstrim (*far-right party*) memperoleh peningkatan dukungan publik secara drastis (Corroon, 1989). Tulisan Corroon (1989) mendeskripsikan fenomena peningkatan dukungan publik terhadap partai sayap kanan ekstrim *Republican Citizens Party* (RCP) dan *National Democratic Party* (NDP) di Jerman Barat dan Partai *National Front* di Perancis. Peningkatan dukungan publik ini menurut Corroon (1989) disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap partai politik mainstream untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Jerman Barat dan Perancis pada saat itu (Corroon, 1989).

Kegagalan partai politik mainstream dalam menanggulangi persoalan publik di Jerman dan Perancis seperti jumlah penduduk migran yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pengurangan anggaran jaminan sosial, telah mendorong masyarakat di Jerman dan Perancis untuk melakukan aksi protes dengan memberikan dukungan terhadap partai politik sayap kanan ekstrim dalam pemilu (Corroon, 1989). Isu imigrasi merupakan faktor

utama yang mendorong masyarakat Jerman dan Perancis untuk mendukung Partai RCP, NDP, dan National Front (Corroon, 1989).

Tulisan Corroon (1989) memberikan kontribusi bagi Peneliti dalam melihat fenomena peningkatan dukungan terhadap partai politik sayap kanan ekstrim di Eropa sejak tahun 1980-an. Ini membantu peneliti dalam mendeskripsikan kebangkitan partai sayap kanan ekstrim di Eropa, terutama Eropa bagian barat dan utara. Corroon (1989) juga menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara isu imigrasi dan dukungan terhadap partai sayap kanan ekstrim. Peneliti mengembangkan argumen Corroon (1989) mengenai fenomena tersebut. Peneliti menganalisis pengaruh kebijakan integrasi Uni Eropa terhadap perolehan suara Partai Golden Dawn dalam pemilu Parlemen Yunani tahun 2012. Ini akan mengembangkan argumen Corroon (1989) bahwa peningkatan dukungan terhadap partai sayap kanan juga dapat terjadi pada negara anggota Uni Eropa bagian selatan seperti Yunani.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan sebuah fenomena sosial. Menurut Hadari Nawawi (2012), metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, Nawawi menyatakan bahwa metode deskriptif juga dapat meliputi analisa dan interpretasi data. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian berupa hasil analisis kata maupun angka yang menggambarkan sebuah fenomena. Penelitian ini akan meneliti pengaruh agenda politik anti-imigrasi di Kawasan Uni Eropa dengan melihat contoh kasus kemenangan Partai Golden Dawn pada pemilu Parlemen Yunani tahun 2012.

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui berbagai pustaka seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan imigrasi, partai radikal kanan, dan kemenangan partai Golden Dawn.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data lebih berfokus kepada data-data dari berbagai literatur baik dari buku-

buku, media *online* (internet) seperti artikel-artikel jurnal ilmiah, ataupun berbagai website berita dan website resmi Pemerintah Yunani.

Semua data disajikan oleh Peneliti melalui langkah-langkah pengolahan data seperti pengumpulan informasi dari berbagai sumber data, reduksi data dengan memilih informasi yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Uni Eropa dimulai ketika berakhirnya Perang Dunia. Ini kemudian mendorong terwujudnya *European Coal and Steel Community* (ECSC) pada tahun 1951 sebagai organisasi kawasan yang mawadahi kerja sama antar negara-negara Eropa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemungkinan terjadinya perang (Warleigh-Lack, 2009). Kerja sama ini kemudian semakin terintegrasi sehingga terbentuklah *European Economic Community* (EEC) pada tahun 1957 dan mengawali proses integrasi kawasan menuju Uni Eropa (Warleigh-Lack, 2009). Proses integrasi yang berlangsung tidak hanya mencakup kerja sama ekonomi dalam Kawasan Eropa tetapi juga mencakup aspek politik dan keamanan.

Proses integrasi Kawasan Uni Eropa semakin erat dengan penandatanganan Piagam Maastricht pada tahun 1992. Terdapat dua hal penting dalam penandatanganan tersebut. Kedua hal tersebut adalah 1) terbentuknya Tiga Pilar Kerja Sama Uni Eropa yang meliputi pilar ekonomi, politik, dan sosial-hukum, dan 2) kewenangan lebih besar bagi Parlemen Eropa untuk memutuskan ketentuan hukum Uni Eropa melalui mekanisme *co-decision procedure* yang meliputi pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, dan sebagainya (Suparman, Silvy, & Sudirman, 2010). Tiga Pilar Kerja Sama Uni Eropa menunjukkan capaian proses integrasi Kawasan Uni Eropa, misalnya dengan penetapan Sistem Pasar Tunggal Eropa (pilar ekonomi), kebijakan luar negeri dan keamanan bersama (pilar politik), dan peradilan dan urusan dalam negeri (pilar sosial-hukum). Selain itu, kewenangan yang dimiliki oleh Parlemen Eropa melalui mekanisme *co-decision procedure* memungkinkan Uni Eropa menetapkan berbagai peraturan yang bersifat mengikat terhadap negara anggota Uni Eropa.

Salah satu bentuk peraturan yang bersifat mengikat adalah dengan mewajibkan negara-negara yang menandatangani Piagam

Maastricht untuk meratifikasi Perjanjian Schengen. Perjanjian Schengen memungkinkan warga negara anggota Uni Eropa untuk bebas berpindah dalam Kawasan Uni Eropa selain Inggris dan Irlandia (*Area Schengen*). Perjanjian Schengen telah mengubah definisi batas teritorial negara-negara yang meratifikasinya. Secara internal, negara peserta Schengen tidak perlu lagi melakukan kontrol ketat terhadap akses perbatasan dalam Area Schengen atau antar negara peserta Schengen lain. Secara eksternal, negara peserta Schengen (terutama yang berada pada batas terluar) harus meningkatkan keamanan serta kontrol perbatasan mereka dengan negara non-Schengen (European Commission, n.d. a).

Andrew Geddes (2005) menyatakan bahwa proses integrasi Uni Eropa menjadikan perbatasan negara anggota Uni Eropa menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara anggota Uni Eropa. Perjanjian Schengen telah menunjukkan bahwa Uni Eropa, sebagai organisasi kawasan dan entitas supranasional, memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai aturan yang berlaku di Kawasan Uni Eropa sekaligus memiliki pengaruh langsung terhadap proses pembuatan kebijakan domestik negara anggotanya, terutama mengenai kebijakan imigrasi. Geddes (2005) juga menyatakan bahwa isu imigrasi telah menjadi isu yang sentral di Kawasan Uni Eropa pasca Perang Dunia II sehingga peran Uni Eropa semakin meningkat. Peningkatan tersebut terlihat dari proses integrasi berbagai kebijakan imigrasi dalam Program The Hague yang juga mencakup pembahasan mengenai Area Schengen.

Kemajuan ekonomi Eropa sebagai hasil proses integrasi kawasan juga di saat yang sama juga meningkatkan kualitas pendidikan dan standar hidup warga Uni Eropa sehingga sektor pekerjaan formal lebih diminati warga Uni Eropa daripada sektor pekerjaan informal (Kasimis, 2012). Hal ini berdampak pada peningkatan arus imigrasi menuju kawasan tersebut sejak pasca Perang Dunia II. Akibatnya, negara-negara Uni Eropa yang berada pada daerah perbatasan Area Schengen menjadi pintu masuk utama bagi para imigran non-Uni Eropa yang tertarik untuk menempati sektor pekerjaan informal yang kurang diminati masyarakat Eropa. Peningkatan imigrasi menuju Uni Eropa tersebut juga dialami oleh Negara Yunani yang telah bergabung menjadi anggota Uni Eropa (pada saat itu masih disebut Komunitas

Ekonomi Eropa) sejak tahun 1981. Letak Yunani yang berada pada perbatasan selatan Area Schengen menyebabkan Yunani menerima jumlah imigran yang tinggi.

Yunani merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang menjadi tujuan imigran non-Uni Eropa. Data jumlah imigran yang berpindah ke Yunani mengalami peningkatan drastis sejak tahun 1980-an. Awalnya, Yunani dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah emigrasi yang lebih tinggi daripada jumlah imigrasinya. Namun, sejak tahun 1980-an tren tersebut berbalik. Jumlah emigrasi dari Yunani mengalami penurunan drastis. Di sisi lain, jumlah imigrasi ke Yunani meningkat pesat. Data sensus tahun 2001 Badan Statistik Nasional Yunani (*National Statistical Service of Greece*) mencatat jumlah penduduk migran di Yunani sebanyak 762.191 orang (Mediterranean Migration Observatory, 2004). Kemudian, sebuah laporan dari *International Migration Outlook* dari *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 2010 memperkirakan angka imigran di Yunani berjumlah 1.259.258 orang. Sebanyak hampir 70% imigran di Yunani berasal dari Albania OECD (2014). Laporan OECD tersebut juga menyebutkan bahwa sejak 2007, jumlah imigran yang mendapatkan izin untuk tinggal dan bekerja hanya berjumlah sekitar 650.000 orang (Kasimis, 2012). Ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari jumlah penduduk migran yang ada di Yunani merupakan imigran yang tidak tercatat secara resmi atau ilegal. Angka sensus imigran yang tidak akurat tersebut menunjukkan bahwa imigrasi di Yunani sangatlah sulit untuk dikendalikan.

Peningkatan jumlah imigrasi di Yunani dipengaruhi oleh beberapa hal seperti adanya pemberlakuan aturan ketat bagi masuknya imigran di beberapa negara penerima migran seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa bagian utara pada tahun 1970-an yang menyebabkan gelombang emigrasi dari Yunani berkurang drastis. Transisi pemerintahan junta militer di Yunani menjadi pemerintahan yang demokratis pada tahun 1974 menjadi faktor pendorong bagi para imigran dari negara sekitar Yunani untuk bermigrasi ke Yunani (Kasimis, 2012). Selain itu, unifikasi Yunani ke dalam EEC tahun 1981 juga menjadi faktor pendorong imigrasi di Yunani.

Motivasi para imigran di Yunani beragam, namun sebagian besar bertujuan untuk

mencari pekerjaan. Sebuah laporan dari Theodore Lianos (2004) menyebutkan bahwa kira-kira 54% atau sekitar 438.000 imigran yang ada di Yunani pada tahun 2004 bertujuan untuk mencari pekerjaan. Sebagian besar imigran di Yunani baik legal maupun ilegal menempati sektor pekerjaan informal. Sektor pekerjaan informal yang banyak diminati imigran bergerak dalam bidang pertanian dan jasa konstruksi.

Perjanjian Schengen sebagai bentuk integrasi Uni Eropa menimbulkan beban bagi negara anggota Uni Eropa yang berada di wilayah terluar Area Schengen seperti Yunani. Negara Yunani harus bertanggung jawab untuk menjaga batas terluar Area Schengen dari arus masuk imigran ilegal demi negara Uni Eropa lainnya. Padahal, di sisi lain Yunani menjadi kewanalan akibat menghadapi tingginya jumlah imigran yang tertarik untuk mencari pekerjaan di Uni Eropa. Letak Negara Yunani yang berada di perbatasan selatan Kawasan Uni Eropa menyebabkan Yunani menjadi pintu masuk menuju Kawasan Uni Eropa bagi penduduk negara non-Uni Eropa seperti Albania, Georgia, Rusia, Pakistan, Ukraina, dan India (Triandafyllidou & Gropas, 2007b). Selain itu, tingginya jumlah imigran ilegal di Yunani juga dipengaruhi oleh kemudahan akses masuk menuju Yunani melalui jalur darat dan laut di perbatasan selatan yang sangat sulit untuk diawasi oleh Pemerintah Yunani.

Beban Yunani bertambah dengan diberlakukannya Perjanjian Dublin II (*Dublin Regulation II*) tahun 2003 yang mengatur bahwa seluruh imigran ilegal yang berada di Kawasan Uni Eropa menjadi tanggungjawab negara anggota Uni Eropa pertama yang dimasuki oleh imigran. Sehingga, seluruh imigran ilegal yang tertangkap akan dikembalikan kepada negara pertama yang dimasuki pertama kali oleh imigran tersebut. Sedangkan, Mahkamah Eropa (*European Court of Justice*) memperkirakan bahwa 90 persen imigran ilegal yang berada di Kawasan Uni Eropa masuk melewati perbatasan Yunani (Akrivopoulou, 2013). Inilah yang menyebabkan angka imigrasi di Yunani meningkat pesat sejak tahun 1990-an. Tingginya jumlah imigran di Yunani mendorong Pemerintah Yunani untuk menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol jumlah imigran dan mengintegrasikan para imigran dengan masyarakat lokal Yunani.

Pemerintah Yunani telah menerapkan kebijakan imigrasi sejak tahun 1990-an. Peraturan-peraturan imigrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Yunani diantaranya; Undang-Undang 1975 Tahun 1991 tentang *Entry, Exit, Sojourn, Employment, Removal of Aliens, Procedure for the Recognition of Refugees and other Measures* dan Dekrit Presiden No. 358 dan No. 359 Tahun 1997 yang mengatur tentang program regularisasi imigran. Keikutsertaan Yunani sebagai anggota Uni Eropa kemudian membuat Pemerintah Yunani menerbitkan Undang-Undang 3536 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari Undang-Undang 3386 Tahun 2005. Undang-Undang tersebut dibuat untuk menyelaraskan kebijakan imigrasi Yunani dengan keputusan *Council Directive* dari Dewan Uni Eropa (*The Council of The European Union*) No. 2003/86/EC tentang Reunifikasi Keluarga dan *Council Directive* No. 2003/109/EC tentang Izin Tinggal Jangka Panjang Bagi Warga Negara Non-Uni Eropa.

Kedua keputusan *Council Directive* Dewan Uni Eropa tersebut mengatur bahwa imigran non-Uni Eropa berhak untuk memperoleh hak-hak dasar seperti hak reunifikasi dengan keluarga imigran di wilayah negara Uni Eropa yang didiami dan menyamakan hak para imigran yang telah tinggal dalam jangka panjang dengan penduduk lokal di negara tempat imigran tersebut tinggal. Keputusan *Council Directive* No. 2003/109/EC juga menegaskan bahwa hak dasar yang diterima imigran jangka panjang harus setidaknya sama dengan hak dasar yang diperoleh oleh penduduk lokal di seluruh Uni Eropa. Ini sesuai dengan komitmen Uni Eropa dalam mempromosikan hak asasi manusia melalui *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* dan *Charter of Fundamental Rights of the European Union* (Triandafyllidou, 2009).

Undang-Undang 3536 Tahun 2007 yang dikeluarkan Pemerintah Yunani bertujuan untuk menyederhanakan sekaligus memperbaiki implementasi dari program regularisasi sebelumnya. Undang-Undang ini juga memprakarsai terbentuknya *National Committee for The Integration of Migrants* dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri Yunani yang bertanggung jawab atas koordinasi berbagai kebijakan integrasi imigran di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah (Balourdos, 2010).

Persyaratan untuk mendapatkan izin tinggal dan bekerja bagi imigran sejak tahun 1997 di Yunani semakin mudah dan sederhana. Ini merupakan komitmen Pemerintah Yunani untuk semakin mengintegrasikan imigran dengan penduduk asli Yunani (Balourdos, 2010). Komitmen ini juga merupakan wujud nyata dari adaptasi berbagai perjanjian di tingkat Kawasan Uni Eropa yang mengatur tentang imigrasi. Bahkan, Pemerintah Yunani menetapkan Undang-Undang 3838 Tahun 2010 yang memperbolehkan warga imigran yang telah lama tinggal di Yunani (*long-term resident*) atau memiliki keturunan Yunani untuk berpartisipasi dalam pemilu (Kasimis, n.d.). Kebijakan integrasi imigran bertujuan mendorong imigran untuk mendaftarkan diri mereka secara legal sehingga Pemerintah Yunani memperoleh data akurat mengenai keberadaan imigran di Yunani. Namun, ternyata berbagai peraturan imigrasi yang telah dibuat tidak efektif (Akrivopoulou, 2013). Masih banyak imigran yang tidak mendaftarkan diri dan tetap menjadi tenaga kerja ilegal.

Kebijakan imigrasi Yunani sejak tahun 1990-an telah gagal dalam mengontrol imigrasi di Yunani karena jumlah imigran di Yunani masih tinggi dan pendataan jumlah imigran masih tidak akurat. Selain itu, kebijakan imigrasi Yunani juga dianggap gagal menyalurkan aspirasi masyarakat Yunani karena alih-alih mendeportasi imigran, kebijakan imigrasi yang berlaku justru memudahkan imigran ilegal Yunani untuk melakukan proses regularisasi dan mengintegrasikan imigran dengan masyarakat Yunani. Kegagalan ini disebabkan oleh lemahnya kinerja birokrasi Yunani dan jumlah imigran yang terlalu tinggi. Selain itu, kebijakan imigrasi Yunani juga sangat dipengaruhi oleh reaksi negara Uni Eropa lainnya dan kebijakan imigrasi yang berlaku di tingkat Kawasan Uni Eropa.

Berbagai kebijakan integrasi dan program regularisasi imigran Yunani ditetapkan sebagai reaksi atas kritik keras negara-negara anggota Uni Eropa terhadap Yunani atas perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh para imigran ilegal di perbatasan Yunani pada tahun 1991 (Triandafyllidou, 2009) berdasarkan kebijakan imigrasi Yunani yang berlaku saat itu. Padahal, kebijakan tersebut sebenarnya merupakan respon tegas Pemerintah Yunani untuk merespon peningkatan drastis arus imigrasi menuju Yunani sejak 1990-an. Selain

kritik dari negara Uni Eropa lainnya, kebijakan ini juga dinilai tidak efektif karena jumlah imigran ilegal masih terus meningkat dan pemulangan paksa imigran ilegal membutuhkan biaya yang tinggi.

Kebijakan imigrasi Yunani juga dipengaruhi oleh prinsip Uni Eropa seperti *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* dan *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Ini menyebabkan Pemerintah Yunani harus menyesuaikan kebijakan imigrasinya sehingga hak dasar yang harus diterima para imigran dan hak dasar yang diterima oleh warga negara anggota Uni Eropa harus sama (Triandafyllidou, 2009). Uni Eropa juga mengadopsi prinsip *non-refoulement* (Euractiv, 2015) dalam Hukum Internasional yang melarang pengusiran imigran di batas terluar negara. Ini menyebabkan negara Uni Eropa, seperti Yunani tidak dapat secara sepihak melarang imigran untuk masuk ke Yunani di wilayah perbatasan negaranya seperti yang diatur pada kebijakan imigrasi No. 1975 tahun 1991. Keanggotaan Yunani dalam Uni Eropa menyebabkan partai politik *mainstream* yang menjalankan pemerintahan Yunani tidak dapat mengambil langkah tegas untuk mengontrol imigrasi menuju Yunani.

Kebijakan imigrasi Pemerintah Yunani mendapat respon negatif dari masyarakat Yunani karena dianggap merugikan. Pemerintah Yunani yang didominasi oleh partai politik *mainstream* dianggap gagal memenuhi kepentingan masyarakat Yunani untuk mengurangi jumlah imigran yang masih tinggi sejak tahun 1990-an (Kasimis, 2012 & Leivada, 2015). Jumlah imigran di Yunani yang sangat tinggi dan kegagalan Pemerintah Yunani untuk mengontrol arus imigrasi menyebabkan semakin tingginya sentimen negatif masyarakat Yunani terhadap para imigran.

Sentimen negatif tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu lapangan pekerjaan, jaminan sosial, dan identitas nasional. Sebagian besar masyarakat Yunani menganggap bahwa para imigran telah merebut lapangan pekerjaan yang tersedia di bursa kerja dan mengurangi manfaat jaminan sosial yang diterima oleh masyarakat Yunani (Pew Research Centre, 2014). Ini sesuai dengan hasil polling *Gallup* tahun 2012 hingga 2014 bahwa 84 persen masyarakat Yunani menginginkan jumlah imigrasi di Yunani harus dikurangi (International Organization for Migration,

2015). Selain itu, masyarakat Yunani juga merasa terancam dengan kehadiran imigran karena mereka dianggap dapat mengganggu stabilitas politik dan persatuan nasional Yunani (Triandafyllidou, 2009).

Usaha yang dilakukan Pemerintah Yunani untuk mengintegrasikan imigran dengan masyarakat Yunani mendapatkan penolakan. Alasannya, masyarakat Yunani memiliki kebanggaan yang sangat tinggi terhadap identitas nasionalnya. Masyarakat Yunani merasa bahwa identitas nasional Yunani hanya dimiliki oleh bangsa Yunani yaitu orang yang lahir di Yunani atau memiliki keluarga yang secara turun temurun berasal dari Yunani (Triandafyllidou & Gropas, 2007a). Kehadiran imigran yang kemudian diperbolehkan untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan dan bahkan berpartisipasi dalam pemerintahan Yunani dinilai mengancam homogenitas identitas nasional Yunani yang sudah terbentuk sejak awal berdirinya negara tersebut.

Tingginya jumlah imigran yang berasal dari negara Balkan seperti Albania menyebabkan munculnya kekhawatiran masyarakat Yunani terhadap integritas nasional mereka (Triandafyllidou, 2009). Penolakan kebijakan integrasi imigran oleh masyarakat Yunani ternyata tidak diakomodir dengan baik oleh Pemerintah Yunani. Ini kemudian menjadi peluang bagi partai radikal kanan Golden Dawn sebab reaksi penolakan terhadap imigran dinilai dapat terakomodir dengan baik melalui agenda politik anti-imigrasi yang ditawarkan Partai Golden Dawn.

Partai Golden Dawn merupakan partai radikal kanan Yunani yang didirikan pada tahun 1985 oleh Nikolaos Michaloliakos (Zenakos, 2012). Michaloliakos adalah seorang aktivis politik sayap kanan yang mendukung pemerintahan junta militer di Yunani pada tahun 1967-1974 (BBC, 2013). Golden Dawn tergolong sebagai partai radikal kanan karena agenda politik Golden Dawn memiliki pendekatan yang ultra-nasionalis dan non-egaliter (Bobbio, 1996 & Rydgren, 2007). Selain itu, lambang Golden Dawn memiliki kemiripan dengan lambang swastika milik partai sayap kanan ekstrim Nazi di Jerman.

Partai Golden Dawn mengadopsi ideologi nasional-sosialisme (Halikiopoulou, 2015). Ideologi ini percaya bahwa kelas sosial harus ditiadakan. Alasannya, hal tersebut dinilai dapat menghalangi integrasi kelompok masyarakat homogen yang penting di tengah persaingan dengan negara lain (Weissmann,

1996). Nasional-sosialisme percaya bahwa pemerintahan negara harus dilakukan oleh masyarakat sebangsa dari ras atau etnis tertentu yang dipandang lebih unggul (Heeves, n.d.). Ideologi nasional sosialisme kemudian menjadi landasan utama berbagai agenda politik yang ditawarkan Golden Dawn.

Tujuan awal didirikannya Partai Golden Dawn adalah untuk mengembalikan pemerintahan Yunani seperti ketika Yunani dipimpin oleh junta militer di tahun 1967-1974. Golden Dawn pada awalnya juga memiliki agenda utama untuk mengorganisir aksi protes terhadap penggunaan kata 'Macedonia' oleh negara Former Yugoslavia Republic of Macedonia pada tahun 1993 (Wodak, 2015). Agenda politik Golden Dawn kemudian bergeser sejak 1990-an ketika arus imigrasi menuju Yunani meningkat pesat. Golden Dawn lebih memfokuskan agenda politik mereka pada penolakan imigrasi, anti-Uni Eropa, dan anti-Austerity (Leivada, 2015). Agenda politik anti-imigrasi ditawarkan oleh Partai Golden Dawn sebab partai tersebut memiliki sikap negatif terhadap keberadaan imigran. Imigran menurut pandangan Golden Dawn akan menghalangi terwujudnya Negara Yunani yang hanya terdiri dari satu etnis Yunani saja (homogen) (Georgiadou, 2013).

Agenda politik anti-imigrasi ditawarkan Golden Dawn melalui berbagai kampanye politik dan program Golden Dawn menjelang pemilu Parlemen Yunani tahun 2012. Kampanye anti-imigrasi yang dilakukan misalnya berupa pidato pimpinan partai yang secara gamblang menyatakan bahwa Negara Yunani harus terbebas dari para imigran (*Greece only for Greeks*) (Fairclough, 2012). Pemulangan paksa imigran akan mengurangi jumlah imigran di Yunani sehingga dianggap mampu memberikan solusi bagi kekhawatiran terhadap peningkatan persaingan kerja, terutama pada saat krisis ekonomi sejak tahun 2010 di Yunani. Ketika jumlah imigran berkurang, maka secara otomatis masyarakat Yunani berpeluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan terhindar dari pengangguran.

Berkurangnya jumlah imigran juga dapat meringankan beban anggaran Pemerintah Yunani untuk jaminan sosial. Alasannya, jumlah tanggungan pemerintah untuk penyediaan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi pengangguran bagi para imigran akan berkurang drastis. Ini berarti, masyarakat Yunani mendapatkan

pelayanan jaminan sosial yang lebih memadai daripada keadaan sebelumnya.

Agenda politik anti-imigrasi yang ditawarkan Golden Dawn secara otomatis akan menggantikan kebijakan imigrasi Yunani yang berlaku. Ini akan menghilangkan kekhawatiran masyarakat Yunani bahwa keberadaan imigran dapat mengancam identitas nasional mereka. Sebab, kebijakan imigrasi yang ditawarkan Golden Dawn akan menghentikan program regularisasi imigran ilegal, melarang imigran untuk berpartisipasi dalam politik Yunani, dan menghapus hak naturalisasi bagi imigran generasi kedua. Artinya, hak kewarganegaraan Yunani hanya dapat murni diperoleh bagi orang yang lahir dan memiliki keturunan Yunani dari generasi ke generasi sesuai dengan visi Golden Dawn. Kemurnian identitas nasional Yunani ini dinilai mampu menegasikan ancaman yang datang dari keberadaan imigran. Agenda politik anti-imigrasi ini menegaskan posisi Partai Golden Dawn yang berbeda dengan partai politik *mainstream* lainnya yang mendominasi Parlemen Yunani.

Keberhasilan Partai Golden Dawn dalam pemilu Parlemen Yunani tahun 2012 merupakan keberhasilan terbesar sejak partai tersebut berdiri. Fenomena ini mengejutkan banyak pihak sebab Partai Golden Dawn sebelumnya selalu dianggap sebagai partai yang terpinggir dalam politik Yunani. Partai Golden Dawn hanya mengikuti 3 periode pemilu Parlemen Yunani hingga tahun 2012. Perolehan suara Partai Golden Dawn mengalami peningkatan sejak pemilu tahun 1996. Meskipun mengalami peningkatan secara bertahap, perolehan dukungan suara Partai Golden Dawn pada pemilu tahun 1996 dan 2009 lebih rendah dari ketentuan ambang minimum (*electoral threshold*) 3 persen perolehan suara untuk mendapatkan kursi di Parlemen Yunani. Baru kemudian pada tahun 2012, Partai Golden Dawn memperoleh peningkatan dukungan suara secara pesat sebesar 6,68 persen dibandingkan pemilu parlemen sebelumnya (Georgiadou, 2013).

Golden Dawn menggunakan berbagai pendekatan untuk menggali dukungan publik dari kalangan generasi muda. Ini terlihat dari pembentukan divisi khusus dalam struktur Partai Golden Dawn untuk pemuda pada tahun 1990-an yang bernama *Golden Dawn Youth Front* (Koronaïou, Lagos, & Sakellariou, 2015). *Golden Dawn Youth Front* bertugas mengorganisir aktivitas kampanye partai yang

menyasar generasi muda melalui lagu, kursus singkat di berbagai sekolah (Bidelas & Psara, 2014), dan majalah untuk pemuda (Shashati, 2012) untuk mensosialisasikan ideologi partai. Golden Dawn menyasar grup band musik rock untuk menarik dukungan di kalangan generasi muda. Grup band rock beraliran White Power tersebut diundang untuk tampil dalam berbagai konser musik dan festival yang diadakan oleh Golden Dawn (Sakellariou, 2015) sebagai bagian dari aksi propaganda partai tersebut.

Terdapat beberapa alasan mengapa Partai Golden Dawn melakukan pendekatan terhadap generasi muda. Alasan tersebut diantaranya sebagai berikut (Sakellariou, 2015); 1) generasi muda cenderung memiliki semangat dan kreatifitas yang tinggi, 2) generasi muda cenderung memiliki jiwa patriotisme tinggi, 3) generasi muda tidak takut kehilangan sesuatu ketika memulai sebuah pergerakan sosial karena mereka belum memiliki posisi dan status di lingkungan masyarakat, dan 4) generasi muda sangat sensitif terhadap masa depan mereka. Golden Dawn menawarkan ideologi nasional-sosialisme yang pada intinya mengajak generasi muda untuk mengembangkan jiwa patriotisme untuk melakukan perbaikan pada keadaan Yunani. Perbaikan yang dimaksud adalah pemulangan imigran secara besar-besaran karena dianggap mengancam identitas nasional dan masa depan generasi muda Yunani.

Dukungan terhadap Partai Golden Dawn pada pemilu Parlemen Yunani tahun 2012 sebagian besar berasal dari kalangan generasi muda Yunani (Sakellariou, 2015). Ini menggambarkan bahwa strategi Partai Golden Dawn untuk menyasar dukungan dari generasi muda Yunani berhasil. Dukungan yang tinggi dari generasi muda Yunani mampu meningkatkan perolehan suara Partai Golden Dawn secara pesat dalam pemilu Parlemen Yunani tahun 2012. Agenda politik anti-imigrasi Golden Dawn mampu menarik dukungan generasi muda Yunani karena agenda tersebut dinilai berpihak pada masyarakat Yunani dan dianggap dapat menciptakan keadaan yang lebih baik di Yunani. Ini Sesuai dengan karakteristik generasi muda bahwa mereka memiliki jiwa patriotisme yang tinggi dan sensitif terhadap masa depan mereka (Sakellariou, 2015).

Golden Dawn menempatkan generasi muda Yunani sebagai agen perubahan yang dapat memperbaiki keadaan Yunani dengan

mengurangi jumlah imigran sesuai keinginan masyarakat Yunani. Ini menunjukkan bahwa generasi muda mendukung agenda politik anti-imigrasi Golden Dawn yang nasionalis karena berpihak pada masyarakat Yunani dibandingkan dengan kebijakan imigrasi Pemerintah Yunani yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan Uni Eropa. Kemudian, agenda politik anti-imigrasi Golden Dawn juga mampu menepis kekhawatiran generasi muda Yunani terhadap masa depan mereka. Tingginya jumlah imigran menyebabkan persaingan di bursa kerja semakin meningkat terutama pada saat krisis ekonomi Yunani tahun 2010. Generasi muda merupakan kelompok masyarakat yang paling merasa terancam sebab mereka berada pada usia produktif.

Peningkatan dukungan terhadap Partai Golden Dawn sejalan dengan teori *EU Issue Voting* yang diungkapkan Vries (2007). Teori tersebut menyatakan bahwa proses integrasi Uni Eropa dapat mempengaruhi pemilihan umum negara anggota Uni Eropa di tingkat domestik karena memberikan peluang bagi partai politik radikal. Berdasarkan teori Vries (2007), proses integrasi Uni Eropa dapat mempengaruhi pemilihan umum di Yunani karena radikal kanan seperti Golden Dawn memiliki peluang untuk memainkan isu yang berkenaan dengan integrasi Uni Eropa, misalnya isu imigrasi. Tingginya jumlah imigran yang masuk menuju Yunani merupakan dampak dari proses integrasi Uni Eropa. Selain faktor kemudahan mobilisasi pekerja dan kemajuan ekonomi Uni Eropa, jumlah imigrasi yang tinggi juga disebabkan karena adanya kesepakatan di tingkat kawasan mengenai imigrasi bahwa negara Uni Eropa harus memperlakukan mereka dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh Uni Eropa.

Teori Vries (2007) mengatakan bahwa proses integrasi Uni Eropa dapat meningkatkan dukungan terhadap partai radikal kanan karena partai tersebut berperan sebagai pilihan alternatif bagi warga negara yang resisten terhadap integrasi Uni Eropa (*Eurosceptic*). Partai radikal kanan menawarkan berbagai agenda politik yang bertentangan dengan kebijakan hasil proses integrasi Uni Eropa karena ideologi yang mereka adopsi memandang integrasi Uni Eropa akan mengancam identitas dan kedaulatan nasional (Vries, 2007). Hal ini juga sesuai dengan Konsep *Politico-Territorial Identity* yang diungkapkan oleh Knight (1982). Konsep tersebut menjelaskan bahwa abstraksi

identitas individu lebih kuat pada entitas politik di tingkat nasional dibandingkan entitas politik di tingkat supra nasional yang lebih luas. Sehingga, unifikasi identitas di suatu kawasan dapat mendatangkan reaksi negatif berupa penolakan dari individu. Hal ini menurut Knight (1982) disebabkan karena hubungan keterikatan individu lebih kuat pada komunitas yang lebih kecil yang tinggal pada sebuah wilayah yang sama (*common territory*) sehingga ada keinginan untuk menentukan nasib sendiri.

Berdasarkan Konsep *Politico-Territorial Identity*, kebijakan imigrasi Yunani yang mencoba mengintegrasikan imigran dipandang sebagai ancaman karena kebijakan tersebut akan mengacaukan identitas Bangsa Yunani yang telah terbentuk sebelumnya. Masyarakat Yunani memiliki hubungan keterikatan yang lebih kuat terhadap identitas nasionalnya daripada Uni Eropa. Sehingga, masyarakat Yunani menolak untuk mematuhi aturan yang dipengaruhi oleh Uni Eropa. Ini menyebabkan masyarakat Yunani mendukung agenda politik anti-imigrasi Golden Dawn sehingga partai tersebut memperoleh peningkatan dukungan suara secara pesat dalam pemilu tahun 2012.

Peningkatan perolehan suara Golden Dawn dengan agenda politik anti-imigrasinya berbeda dengan tulisan Ellinas (2013) yang menyatakan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya krisis ekonomi Yunani tahun 2010. Krisis ekonomi Yunani tahun 2010 memang menyebabkan reaksi negatif terhadap imigran semakin terasa. Namun, tanpa krisis ekonomi pun masyarakat Yunani sudah merasa terancam karena jumlah imigran semakin bertambah dan kebijakan imigrasi Yunani justru suportif terhadap keadaan tersebut. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 2010 hanyalah sebagai katalisator yang mempercepat peningkatan dukungan terhadap partai radikal kanan Golden Dawn. Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa perolehan suara Golden Dawn relatif meningkat sejak tahun 1996 sebelum krisis ekonomi terjadi.

Teori *EU Issue Voting* (Vries, 2007) juga mengungkapkan bahwa perubahan pola dukungan publik terhadap partai radikal kanan dapat terjadi bila isu mengenai integrasi Uni Eropa merupakan isu yang dominan (*high EU issue salience*) dalam sebuah negara dan tingkat konflik antar partai mengenai isu integrasi Uni Eropa tinggi (*high partisan conflict*). Dalam konteks Yunani, isu integrasi

Uni Eropa merupakan isu yang dominan dalam masyarakat Yunani. Ini terlihat dari adanya kaitan antara jumlah imigran yang tinggi dan proses integrasi Uni Eropa. Resistensi terhadap imigran juga sebenarnya menunjukkan sikap masyarakat Yunani yang anti-Uni Eropa. Politik Yunani juga memiliki tingkat konflik partisan yang tinggi mengenai integrasi Uni Eropa. Partai politik *mainstream* seperti ND dan PASOK cenderung suportif terhadap integrasi Uni Eropa, sedangkan partai radikal kiri dan kanan seperti SYRIZA (Angelos, 2015) dan LAOS (Mudde, 2015), serta Golden Dawn (Smith, 2015) sangat anti-Uni Eropa.

Agenda anti-imigrasi yang ditawarkan Golden Dawn selaras dengan ideologinya menentang integrasi Uni Eropa karena dianggap mengancam kedaulatan dan identitas nasional Yunani. Ketika sebuah negara menjadi anggota sebuah organisasi kawasan dan bersedia tunduk terhadap segala aturan yang telah ditetapkan bersama, maka secara tidak langsung negara tersebut telah menyerahkan sebagian kedaulatannya pada sebuah entitas politik supranasional organisasi kawasan yang membatasi perilaku negara tersebut (Betts, 2009). Reaksi negatif masyarakat Yunani yang memandang imigran sebagai ancaman terhadap identitas nasional mereka diakomodasi oleh agenda politik anti-imigrasi Golden Dawn sehingga menyebabkan banyak masyarakat Yunani yang mendukung partai radikal kanan tersebut pada pemilu tahun 2012.

5. KESIMPULAN

Peningkatan pesat perolehan suara Partai Golden Dawn dalam pemilu tahun 2012 merupakan sebuah fenomena yang menarik. Alasannya, perolehan tersebut menandai keberhasilan Golden Dawn untuk mendapatkan kedudukan di Parlemen Yunani untuk pertama kalinya sejak partai tersebut berdiri pada tahun 1985. Kebangkitan Golden Dawn disebabkan oleh agenda politik anti-imigrasi yang ditawarkan oleh partai tersebut. Agenda politik anti-imigrasi mendapatkan dukungan yang tinggi karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah imigrasi Yunani yang tinggi, kegagalan kebijakan imigrasi yang ditetapkan partai politik *mainstream* Yunani, dan pendekatan Golden Dawn terhadap generasi muda Yunani.

Perjanjian Schengen sebagai salah satu hasil proses integrasi Uni Eropa dianggap membebani masyarakat Yunani karena mendorong peningkatan arus imigrasi secara drastis menuju negara tersebut. Ini disebabkan karena Perjanjian Schengen mampu memajukan ekonomi Uni Eropa sehingga memotivasi warga negara non-Uni Eropa untuk mencari keuntungan ekonomi dengan bermigrasi ke wilayah Uni Eropa. Yunani sebagai negara yang berbatasan langsung dengan negara non-Uni Eropa menjadi pintu masuk utama para imigran menuju Kawasan Uni Eropa. Yunani kewalahan menghadapi arus imigrasi yang sangat tinggi dari luar Uni Eropa.

Reaksi negatif terhadap keberadaan imigran di Yunani tidak mampu diakomodir oleh kebijakan imigrasi yang berlaku. Kebijakan tersebut ditetapkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Yunani untuk menaati kebijakan yang telah disepakati bersama di tingkat kawasan. Ini menyebabkan kebijakan imigrasi di Yunani cenderung suportif terhadap imigran sejak tahun 1997, suatu hal yang bertentangan dengan keinginan masyarakat Yunani. Golden Dawn memanfaatkan kondisi ini dengan menawarkan agenda politik anti-imigrasi sebagai pilihan alternatif yang mampu mengakomodir reaksi negatif masyarakat Yunani terhadap keberadaan imigran. Peningkatan Dukungan terhadap Golden Dawn juga disebabkan oleh pendekatan yang dilakukan Golden Dawn terhadap generasi muda Yunani. Generasi muda Yunani yang memiliki jiwa patriotisme tinggi mendukung agenda politik Partai Golden Dawn karena dinilai mampu menjaga keutuhan identitas nasional Yunani dan mewujudkan Yunani yang lebih baik.

Fenomena peningkatan perolehan suara Partai Radikal Kanan Golden Dawn pada pemilu Perlemen Yunani tahun 2012 menggambarkan bahwa penguatan peran organisasi kawasan melalui proses integrasi regionalisme dapat menuai reaksi negatif yang ditunjukkan dengan cara memberikan dukungan pada partai radikal kanan yang anti-integrasi. Pernyataan ini didukung oleh teori yang diungkapkan Vries (2007) yang menyatakan bahwa integrasi Uni Eropa dapat mempengaruhi pemilu nasional negara anggota Uni Eropa. Alasannya, isu integrasi Uni Eropa akan digunakan oleh partai radikal kanan seperti Golden Dawn untuk meningkatkan perolehan suara partai tersebut

sehingga mempengaruhi pola dukungan suara pemilu nasional.

Integrasi suatu organisasi kawasan menghasilkan kebijakan yang berlaku di tingkat kawasan dan harus diadaptasi pada kebijakan di tingkat nasional. Reaksi negatif warga negara anggota organisasi kawasan tersebut muncul karena warga negara cenderung tidak ingin diatur oleh kebijakan internasional di tingkat kawasan apalagi jika kebijakan tersebut dinilai merugikan. Pernyataan ini diperkuat dengan konsep *politico-territorial identity* yang diungkapkan oleh Knight (1982) bahwa individu cenderung berpihak pada negaranya dibandingkan organisasi kawasan karena individu memiliki hubungan keterikatan yang lebih kuat pada negaranya. Hubungan keterikatan ini berasal dari abstraksi identitas individu yang lebih erat pada entitas politik yang ruang lingkungannya lebih kecil seperti negara dibandingkan entitas politik yang lebih luas seperti kawasan supranasional. Sehingga, peningkatan proses integrasi di tingkat kawasan dapat memunculkan reaksi penolakan dari individu sebuah negara yang menolak menyamakan identitas nasionalnya dengan identitas kawasan dan ingin menentukan nasib sendiri.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Akrivopoulou, C. (2013, Oktober 3). *The Silent Greek Crisis: Nationalism, Racism and Immigration*. Diambil kembali dari I-CONnect:
<http://www.iconnectblog.com/2013/10/the-silent-greek-crisis-nationalism-racism-and-immigration/>
- Angelos, J. (2015, Juni 21). *The Face of Greek Resistance*. Dipetik November 24, 2015, dari website Foreign Policy:
foreignpolicy.com/2015/06/21/the-face-of-greek-resistance-glezos-eu-imf/
- Balourdos, D. (2010, November 18). *Making Success of Integrating Immigrants into Labour Market*. Diambil dari website European Commission:
<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8213&langId=en>
- BBC. (2013, Oktober 1). *Profile: Greece's far-right Golden Dawn party*. Diambil dari website BBC:
<http://www.bbc.com/news/world-europe-24346993>

- Betts, A. (2009). *Forced Migration and Global Politics*. West Sussex: Wiley-Blackwell.
- Bidelas, L., & Psara, M. (2014, Maret 19). *Here's Some of the Stuff the Golden Dawn Are Into*. Diambil dari website Vice Media: http://www.vice.com/en_uk/read/golden-dawn-political-immunity-lift-greece
- Bobbio, N. (1996). *Left and Right: The Significance of a Political Distinction*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Corroon, S. (1989). The Re-emergence of Europe's Far-Right. *Harvard International Review*, 60-62.
- Ellinas, A. (2013). The Rise Of Golden Dawn: The New Face of the Far Right in Greece. *South European Society and Politics*.
- Euractiv. (2015, Mei 5). *EU Won't adopt Australian model of turning back immigrant boats*. Dipetik November 24, 2015, dari Euractiv: www.euractiv.com/sections/global-europe/eu-wont-adopt-australian-model-turning-back-immigrant-boats-314312
- European Commission. (n.d. a). *E-Libraries: Migration and Home Affairs*. Dipetik April 4, 2015, dari European Union: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_en.pdf.
- Eurostat. (2014, Mei 8). *Unemployment Rate 2002-2013*. Dipetik April 26, 2015, dari European Union: [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rate_2002-2013_\(%25\).png](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rate_2002-2013_(%25).png)
- Fairclough, G. (2012, Oktober 16). World News: Far-Right Party Taps Greek Anger --- Anti-Immigrant Golden Dawn Makes Gains With Voters Frustrated With the Political Establishment. *The Wall Street Journal*, hal. A.10.
- Geddes, A. (2005). Europe's Border Relationships and International Migration Relations. *Journal of Common Market Studies*, 43(4), 787-806.
- Georgiadou, V. (2013). Country Analysis: Greece. In R. Melzer, & S. Serafin, *Right-Wing Extremism in Europe: Country Analysis, Counter-Strategies and Labor-Market Oriented Exit Strategies* (hal. 75). Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.
- Halikiopoulou, D. (2015, Juni 23). *Why The Golden Dawn is a Neo-Nazi Party*. Diambil dari website The Huffington Post: www.huffingtonpost.co.uk/daphne-halikiopoulou/golden_dawn_b_7643868.html
- Heeves. (n.d.). *Difference between Fascism and Nazism*. Diambil dari website Heeves: www.heeves.com/modern-history/difference-between-fascism-and-nazism.html
- Hellenic Republic Ministry of Interior. (2014, Agustus 20). *Elections*. Dipetik Agustus 20, 2014, dari ypes.gr: <http://www.ypes.gr/en/Elections/NationalElections/Results/>
- Igraphics. (2012, Juni 18). *Greek Legislative Election 2012*. Dipetik Agustus 20, 2014, dari Igraphics.gr: <http://www.igraphics.gr/en/multimedia/2012/06/elections2012b>
- International Organization for Migration. (2015, Januari 23). *How the World Views Migration: IOM - Gallup World Poll*. Diambil dari website IOM: <http://www.iom.int/news/how-world-views-migration-iom-gallup-world-poll>
- Jozwiak, A. (2012). Immigration, Integration, and Public Opinion in the European Union. *Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the European Union*, Artikel 11.
- Kasimis, C. (2012, Maret 8). *Greece: Illegal Immigration in the Midst of Crisis*. Diambil kembali dari Website Migration Policy Institute: <http://www.migrationpolicy.org/article/greece-illegal-immigration-midst-crisis>
- Kasimis, C. (n.d.). *From Growth to Crisis: The 'Suspended Step' of Immigrants in Greece*. Dipetik April 19, 2015, dari Migration Citizenship Education: <http://migrationeducation.de/23.0.html>
- Kiprianos, et al. (2003, April). Greek Policy towards Immigration and Immigrants. *Social Policy & Administration*, 37(2), 148-164.
- Knight, D. B. (1982). Identity and Territory: Geographical Perspectives on Nationalism and Regionalism. *Annals of the Association of American Geographers*, 514-531.
- Koronaïou, A., Lagos, E., & Sakellariou, A. (2015). Singing for Race and Nation: Fascism and Racism in Greek Youth Music.

- Dalam A. Simpson, & H. Druxes, *Digital Media Strategies of The Far Right in Europe and The United States* (hal. 200). London: Lexington Press.
- Kotsoni, E. (2013, Oktober 2). "They Are Filth": Greece's Immigrants Are Pretty Thrilled About the Golden Dawn Arrests. Diambil dari website VICE: <http://www.vice.com/read/javied-aslam-interview>
- Leivada, D. (2015, September 10). *The Huffington Post website*. Dipetik September 22, 2015, dari Golden Dawn Is Running In Greece's Elections Again. Here's Why That's Scary: http://www.huffingtonpost.com/entry/greece-election-golden-dawn_55f03572e4b093be51bcdb0d
- Lianos, T. (2004). *The Impact of Immigration on Greece's Society*. Athena: European Migration Network.
- Mason, P. (2012, Oktober 17). *Alarm at Greek police 'collusion' with far-right Golden Dawn*. Diambil dari website BBC: <http://www.bbc.com/news/world-19976841>
- McLaren, L. (2003). Anti-Immigrant Prejudice in Europe: Contact, Threat Perception, and Preferences for the Exclusion of Migrants. *Social Forces*, 909-936.
- McLaren, L. (2007). Explaining Mass-Level Euroscepticism: Identity, Interests, and institutional Distrust. *Acta Politica*, 233-251.
- Mediterranean Migration Observatory. (2004). *Statistical Data on Immigrants in Greece: An Analytical Study of Available Data and Recommendations for Conformity with European Union Standards*. Athena: Mediterranean Migration Observatory.
- Mudde, C. (2014, Mei 30). *The Far Right in The 2014 European Elections: Of Earthquakes, Cartels and Designer Fascists*. Dipetik April 26, 2015, dari The Washington Post: <http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/05/30/the-far-right-in-the-2014-european-elections-of-earthquakes-cartels-and-designer-fascists/>
- Mudde, C. (2015, Maret 13). *Local shocks: The Far Right in the 2014 European Elections*. Dipetik November 24, 2015, dari Eurozine: www.eurozine.com/articles/2015-03-13-mudde-en.html
- Nawawi, H. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- OECD. (2014). *International Migration Outlook 2014*. OECD Publishing.
- Pew Research Centre. (2014, Mei 12). *Most Greeks, Italians See Immigrants as an Economic Burden*. Diambil dari website Pew Research Centre: <http://www.pewglobal.org/2014/05/12/a-fragile-rebound-for-eu-image-on-eve-of-european-parliament-elections/pg-2014-05-12-eu-3-04/>
- Red Pepper. (2009, Agustus). *Europe's Far Right Rises*. Diambil dari website Red Pepper: <http://www.redpepper.org.uk/Europe-s-far-right-rises/>
- Robolis, S. (2009). Immigration in Greece: Overview and Perspectives. *Social Cohesion and Development*, 27-44.
- Rydgren, J. (2007). The Sociology of The Radical Right. *Annual Review of Sociology*, 241-262.
- Sakellariou, A. (2015). *Golden Dawn and Its Appeal to Greek Youth*. Athena: Friedrich Ebert Stiftung.
- Shashati, C. (2012, Mei 14). *Is Greece's Golden Dawn a neo-Nazi party?* Dipetik September 22, 2015, dari Euractiv: <http://www.euractiv.com/elections/golden-dawn-party-greece-neo-nazi-party-analysis-512672>
- Smith, H. (2015, September 16). *Greek elections 2015: Golden Dawn rises on austerity-driven despair*. Dipetik November 24, 2015, dari The Guardian: <http://www.theguardian.com/world/2015/sep/16/greek-election-2015-golden-dawn-austerity>
- Suparman, N., Silvy, D., & Sudirman, A. (2010). *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Triandafyllidou, A. (2009). Greek Immigration Policy at the Turn of the 21st Century: Lack of Political Will or Purposeful Mismanagement? *European Journal of Migration and Law*, 159-177.

- Triandafyllidou, A., & Gropas, R. (2007a, April 12). *Cultural Diversity in Greek Public and Political Discourses*. Dipetik Agustus 27, 2015, dari ELIAMEP: http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/en/2008/05/greece_report_multicultural_discourses_final.pdf
- Triandafyllidou, A., & Gropas, R. (2007b). *European Immigration: A Source Book*. Hampshire: Ashgate.
- Vries, C. (2007). Sleeping Giant: Fact or Fairytale? How European Integration Affects National Elections. *European Union Politics*, 363-385.
- Warleigh-Lack, A. (2009). *European Union: The Basics*. New York: Routledge.
- Weissmann, K. (1996). The Epoch of National Socialism. *The Journal of Libertarian Studies*, 257-294.
- Wodak, R. (2015). *The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean*. London: Sage.
- Zenakos, A. (2012, Oktober 25). *Golden Dawn, 1980-2012. The Neo-Nazi's Road to Parliament*. Diambil dari website Borderline Report: <http://borderlinereports.net/2012/10/25/report-golden-dawn-1980-2012-the-neonazis-road-to-parliament/>